

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MALANG IMPLEMENTATION OF POVERTY REDUCTION POLICIES IN MALANG CITY

Yuli Indah Sari<sup>1</sup>, Willy Tri Hardianto<sup>2</sup>, Annisa Purwatiningsih<sup>3</sup>, Asih Widi Lestari<sup>4</sup>

E-mail: [yuliindahs00@gmail.com](mailto:yuliindahs00@gmail.com)<sup>1</sup>, [willytrihardianto@unitri.ac.id](mailto:willytrihardianto@unitri.ac.id)<sup>2</sup>, [anisapurwatiningsih@unitri.ac.id](mailto:anisapurwatiningsih@unitri.ac.id)<sup>3</sup>,  
[asihwidilestari@unitri.ac.id](mailto:asihwidilestari@unitri.ac.id)<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

\*corresponding author

Dikirimkan: 03-11-2023; Diterima: 02-05-2024; Diterbitkan: 03-05-2024

DOI: <https://doi.org/10.30996/jpap.v9i2.9732>

### Abstract

*The government is currently launching a number of programs aimed at improving health, education, the economy and most importantly, meeting food needs which can reduce the burden on society in meeting subsistence needs. It is hoped that the existence of various poverty alleviation programs launched by the government can influence the reduction of poverty rates in Indonesia and achieve it more quickly according to the targets that have been set. This is important for poverty alleviation efforts. The aim of this research is to identify the implementation of poverty alleviation in Malang City as well as the factors that support and hinder the implementation of poverty alleviation in Malang City. This research uses a qualitative approach to obtain data, including observation, interviews and documentation, as well as snowball sampling to determine informants. Data analysis occurs in three stages: data collection, data presentation, and conclusions. According to research, the implementation of poverty alleviation policies in Malang City has run smoothly and according to procedures, and mentoring and outreach have also been carried out to the community, however there are several obstacles in handling this assistance, including the data provided being managed by the Ministry of Social Affairs which still takes time long.*

**Keywords:** Poverty, overcoming, Program, Government.

### Abstrak

*Pemerintah saat ini sedang meluncurkan sejumlah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, perekonomian dan yang terpenting, memenuhi kebutuhan pangan yang dapat mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan subsisten. Adanya berbagai program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah diharapkan dapat mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Indonesia dan mencapainya lebih cepat sesuai target yang telah ditetapkan. penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasinya penanggulangan kemiskinan di Kota Malang, serta unsur-unsur pendukung dan penghambat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan snowball sampling untuk mengidentifikasi informan. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian, pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan di Kota Malang berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur, serta minitoring dan sosialisasi juga telah dilakukan kepada masyarakat, namun terdapat beberapa kendala dalam upaya penanganan pendampingan ini, diantaranya data yang diberikan dikelola oleh Kementerian Sosial yang masih memakan waktu lama.*

**Kata kunci:** Kemiskinan, penanggulangan, Program, Pemerintah.

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.203.917 jiwa. Pasal 34 UUD 1945 tentang kesejahteraan sosial mewajibkan negara untuk mengurus anak-anak miskin dan terlantar serta menyelenggarakan sistem perlindungan dan keamanan sosial secara nasional. Menurut Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota

Malang. Pergub Jawa Timur No. 49 Tahun 2012. Perpres No. 15 Tahun 2010 dengan di dukung Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kota Malang merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 252.10 km<sup>2</sup>. Dinegara-negara berkembang, terdapat banyak peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut mengarah pada distribusi program perlindungan sosial jangka panjang (Kurnianingsih et al., 2020). Dalam menjalankan peran dan tugasnya, pemerintah tentunya tidak terlepas dari kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga merupakan salah satu tujuan negara Indonesia: peningkatan kesejahteraan umum. Kesejahteraan bangsa telah menjadi tujuan bersama negara ini dari dulu hingga saat ini. (Mojosari et al., 2018).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk menganalisis hasil pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah terus membaik, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut baik-baik saja. (Romi & Umiyati, 2018). Dampak permasalahan kemiskinan terhadap kehidupan sosial sangatlah kompleks.

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana individu tidak mampu mencapai taraf hidup kelompoknya dan tidak mampu memanfaatkan sumber daya fisik, mental, atau energi kelompoknya. (Kemiskinan et al., 2010)wiya, 2016). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 27,55 juta penduduk miskin di Indonesia yang masuk dalam kategori kurang mampu. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak aspek yang mempengaruhi hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Apabila penyebab kemiskinan merupakan akibat dari Kekurangan dan kelemahan pribadi, serta strategi penyelesaiannya, akan lebih memfokuskan upaya untuk mengubah aspek kemanusiaan sebagai individu atau anggota masyarakat (Wardi, 2020).

Dalam hal ini, upaya pengembangan masyarakat akan fokus pada peningkatan kualitas manusia sehingga dapat secara efektif mengatasi peningkatan taraf hidup. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya dilakukan semenjak dasawarsa 1970-an. (Wardi, 2020). Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi wakil Presiden Republik Indonesia, pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program penanggulangan. (Imam et al., n.d.)

kemiskinan dalam tiga kelompok (klaster) kebijakan Jumlah penduduk miskin belum sepenuhnya berkurang, bahkan kemiskinan dapat dikatakan menjadi salah satu permasalahan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan mendasar pemerintah, meskipun berbagai program masih belum berjalan sesuai harapan. Pengentasan kemiskinan memerlukan integrasi kebijakan program di

berbagai sektor. (Satria, 2020). Menurut Badan Amir Zakat Nasional (Baznath) Kota Malang, UMKM yang meminjam uang ke koperasi untuk operasionalnya cenderung membayar bunga yang lebih tinggi, dan beberapa pinjamannya berlipat ganda. Dengan ini, pemerintah pusat telah membentuk pola perubahan birokrasi tema, dengan tujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan. (Egatya, 2022)

Upaya penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan tidak hanya sebatas memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin. Program ini juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dengan mengembangkan potensi mereka dan memperkuat kapasitas mereka untuk berpartisipasi sebagai agen pembangunan. (Pakistaji et al., 2019). Dukungan ini terus berlanjut pada tahun anggaran ini, dan dalam prosesnya telah diterapkan sistem yang membuat kemas non-tunai tidak hanya untuk beras tetapi juga untuk paket sembako yang disebut BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Kita juga bisa melihat kemajuannya bertindak. Kini ada juga bantuan bersyarat yang ditawarkan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini mencakup faktor-faktor tertentu dan kriteria khusus untuk menerima bantuan tersebut.

Pemerintah saat ini sedang meluncurkan sejumlah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, perekonomian dan yang terpenting, memenuhi kebutuhan pangan yang dapat mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan subsisten. Salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan terhadap daerah miskin dan berpendapatan rendah adalah melalui program subsidi pangan, dalam hal ini berupa beras. (Mufatiroh et al.2021). Menjadi jelas bahwa pertumbuhan ekonomi, yang selama ini merupakan instrumen dominan dalam strategi pengentasan kemiskinan, tidaklah cukup. Pertumbuhan saja tidak cukup untuk memperbaiki kondisi kehidupan di negara-negara selatan. Lebih lanjut, dari perspektif sosial, pertumbuhan dapat berdampak negatif jika tidak diberlakukan kebijakan lain yang secara eksplisit Bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Hadna & Kartika, 2017).

Pemerintah mempunyai aturan tentang bagaimana membantu masyarakat miskin. Mereka menggunakan uang dari anggaran pemerintah yang besar untuk melakukan hal ini. (Hutagalung et al., 2022). Pemerintah telah menyelenggarakan program-program untuk membantu mengurangi kemiskinan ke dalam berbagai kategori berdasarkan di mana program tersebut akan dilakukan. Hal ini akan dilakukan dalam langkah atau fase yang berbeda seiring berjalannya waktu ditingkat Pusat telah membentuk kelompok yang disebut TKPK untuk membantu mengurangi kemiskinan. Wakil Presiden bertanggung jawab atas kelompok ini. Ada pula kelompok yang disebut TKPKD di setiap daerah di Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Walikota atau Wakil Bupati. Mereka semua bekerja sama untuk membantu orang-orang yang miskin. (Romi & Umiyati, 2018). Pemerintah telah membuat program untuk membantu masyarakat miskin di Indonesia. Program-program ini akan membantu mengurangi jumlah penduduk miskin dengan lebih cepat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Membantu orang-orang yang berada dalam kemiskinan

sangatlah penting.

Kita bisa melakukan lebih dari sekadar memberi mereka uang atau barang yang mereka perlukan. Kami juga dapat membantu mereka merasa lebih kuat dan percaya diri sehingga mereka dapat meningkatkan kehidupan mereka sendiri. (Rakhmat, 2019 n.d.). Program ini merupakan rencana besar yang melibatkan berbagai bagian pemerintahan. Ini mencakup berbagai departemen dan kantor di tingkat nasional dan regional. Mereka semua bekerja sama untuk memastikan program ini berhasil dan setiap departemen melakukan tugas spesifiknya masing-masing. (Waryadi et al., 2022). Program pengentasan kemiskinan ibarat aturan dan tindakan yang ditetapkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang tidak mempunyai banyak uang. Pemerintah melakukan berbagai hal untuk memastikan orang-orang ini mendapatkan apa yang mereka butuhkan, seperti makanan dan bantuan kesehatan. Hal ini membantu seluruh komunitas menjadi lebih kuat dan tidak menghadapi banyak masalah. (Suharto & Aep Gunarsa, 2017)

Aturan dari pemerintah ini dibuat untuk menyesuaikan dengan jumlah uang yang dimiliki setiap daerah. Hal serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nduga. Papua mempunyai uang khusus yang diberikan kepada penduduk asli untuk membantu mereka tetap aman dari masalah dan menjaga mereka dari kesulitan keuangan (Prionggo et al., 2019). Kebijakan sosial membantu kita mempersiapkan dan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat kita. Hal ini juga membantu memastikan bahwa masyarakat mempunyai apa yang mereka perlukan untuk menjalani kehidupan yang baik, baik mereka sendiri, bersama keluarga, atau bersama kelompok. Kebijakan sosial juga mendorong masyarakat untuk bekerja sama dan berbagi sumber daya sehingga kebutuhan setiap orang dapat terpenuhi dan komunitas kita dapat bekerja dengan baik. (Kasmad, 2018).

#### 1.4 Data Kemiskinan 2023

**PROYEKSI DATA KEMISKINAN 2023**

DINAS SOSIAL PSAP2KB  
KOTA MALANG

PERBANDINGAN ANGKA KEMISKINAN BPS DAN DINSOS PSAP2KB KOTA MALANG

TAHUN	DTRS		BPS		PKH		PERSENTASE KEMISKINAN	
	JIWA	KELUARGA	JIWA	KELUARGA	JIWA	KELUARGA	DINSOS	BPS
2023 (SEPT)	185.475	72.120	BELUM	BELUM	37.144	9.286	4,25%	BELUM
2022	202.341	76.371	36.576	9.244	40.384	10.096	4,77%	4,37%
2021	211.076	79.644	39.036	9.759	38.020	9.505	4,50%	4,62%
2020	126.622	41.422	37.403	9.366	39.176	9.794	4,64%	4,44%

JUMLAH PENDUDUK KOTA MALANG

TAHUN	2020	2021	2022	2023 (JUNI)
JUMLAH	843.810	844.933	846.126	874.660

Berdasarkan hasil analisis dan penjabaran beberapa permasalahan diatas dalam menelaah terkait penanganan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian “Implementasi Kebijakan Tentang Penanggulangan

kemiskinan di Kota Malang” untuk menjabarkan secara jelas bagaimana mekanisme penerapan program-program guna menurunkan angka kemiskinan pengelolaan terminal oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang berlangsung di Kota Malang. Dari tabel diatas bahwa pada tahun 2022-2023 meningkat menjadi 4,26% pada tahun 2022 sekitar 4,25% dan pada tahun 2023 4,26% dari data diatas bahwa angka kemiskinan meningkat hal ini bahwa pemerintah belum sepenuhnya menangani masalah kemiskinan yang ada di Kota Malang, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian “ Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Malang”. Untuk menjabarkan secara jelas bagaimana mekanisme penanganan kemiskinan di Kota Malang.

## 2. Metode

Pendekatan penelitian kualitatif diterapkan dalam penyelidikan ini Penelitian kualitatif adalah ketika para ilmuwan mencoba memahami mengapa orang melakukan hal-hal tertentu atau berpikir dengan cara tertentu. Mereka berbicara dengan orang lain dan mengajukan pertanyaan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pikiran dan tindakan mereka. "Metode penelitian naturalistik" adalah nama lain untuk strategi penelitian kualitatif ini karena dilakukan dalam pengaturan alam. Akibatnya, urutan kejadian dapat bervariasi berdasarkan penyakit dan jumlah gejala yang ditemukan. Tujuan peneliti umumnya praktis. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencari tahu bagaimana penanggulangan kemiskinan diterapkan di Kota Malang. Masalah utama yang timbul dari kejadian yang terjadi atau pengetahuan yang diterima melalui literatur ilmiah atau literatur lain adalah subjek penyelidikan. Berikut ini adalah topik penelitian: Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang Menggunakan Model Van Meter Van Horn adalah tentang bagaimana kebijakan dibuat dan dilaksanakan. Hal ini melihat hal-hal seperti seberapa besar suatu kebijakan dan apa tujuannya. Laporan ini juga membahas asal usul kebijakan dan organisasi-organisasi yang membantu mewujudkan kebijakan tersebut. Model ini juga melihat bagaimana organisasi-organisasi ini berbicara satu sama lain dan bekerja sama. Hal ini mempertimbangkan orang-orang yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dan bagaimana perasaan mereka terhadap kebijakan tersebut. Terakhir, bab ini mengkaji faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan dan cara penerapannya. Metode pengambilan sampel bola salju digunakan dalam penyelidikan ini. Snowball sampling adalah pendekatan pengambilan sampel non-probabilitas di mana sampel mengandung sifat-sifat yang tidak biasa. Strategi pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti individu yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Atau mungkin dia adalah penguasa untuk memudahkan peneliti menyelidiki item/keadaan sosial yang diselidiki (Sugiyono, 2021: 289).

Kami memilih orang-orang tertentu untuk membantu penelitian kami. Informan minimal adalah orang yang paling mengetahui tentang apa yang kita pelajari. Kami juga memilih seseorang yang memiliki posisi baik untuk memberikan informasi yang jelas dan

bermanfaat. Itu sebabnya kami memilih *key informan* sebagai informan kunci untuk penelitian ini Heri Wiyono, S.Pd., MM selaku Pembina penyuluh sosial muda perberdayaan sosial, Ibu Djoewita Wahanani, SE., MM selaku Pelatih kepala seperti seorang pemimpin yang membantu orang-orang yang kurang beruntung dan mengajari mereka cara menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri dalam hidup mereka. dan Ibu RR. Irma Fitrianti, A.Md selaku Penata Muda pengelola kesejahteraan sosial.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

Penulis dapat mengidentifikasi implementasi strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Malang dengan program-program yang telah beroperasi berdasarkan temuan penelitian yang telah diselesaikan di lokasi penelitian. Menurut temuan penelitian ini, implementasi merupakan alat analisis yang digunakan dalam mengkaji pelaksanaan inisiatif Membuat rencana untuk membantu masyarakat miskin di Kota Malang.

#### **I. Bantuan BPNTD**

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan program yang disebut Subsidi Rastra. Hal ini akan menjadikan program ini lebih baik dalam membantu masyarakat dan juga akan memudahkan masyarakat dalam menggunakan uang mereka. Ini akan dimulai pada tahun 2017 dan akan terjadi dalam langkah-langkah yang berbeda di daerah-daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan infrastruktur yang memadai. Selain memberikan lebih banyak pilihan pangan, Bantuan pangan non-tunai yang diberikan oleh bank membantu masyarakat memutuskan kapan harus menarik uang dan memungkinkan mereka menyimpannya untuk digunakan nanti. Ini juga membantu Anda menciptakan sesuatu yang dapat Anda gunakan atau jual untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan uang potensi tabungan. Terakhir, Memberikan makanan yang tidak berbentuk uang kepada orang yang membutuhkan diharapkan dapat meningkatkan Program BPNT mencoba membantu masyarakat dengan memberi mereka lebih banyak cara untuk mengelola uang mereka. Ini akan membuat hidup mereka lebih baik dan membantu mereka mempunyai lebih banyak uang jangka panjang yang Pemerintah, otoritas lokal, dan/atau masyarakat berkoordinasi untuk memperkuat, mendukung, dan memfasilitasi warga dalam mencapai kebutuhan dasarnya melalui kebijakan, program, dan kegiatan. Setiap orang berhak mendapatkan beras dan telur senilai Rp 150.000 per bulan dalam program ini, Ini akan disediakan oleh administrasi Dinsos dan Kelurahan. Diharapkan dengan dilaksanakannya BPNT ini, masyarakat akan mendapatkan pangan yang cukup dan akan membantu dalam penyediaan pangan bagi mereka yang membutuhkan.

1.4 Tabel Total Anggaran Bantuan Sosial

Total Anggaran Bantuan Sosial	
Tahun	Total
2018	4 M
2019	4 M
2020	3 M
2021	5.99 M
2022	5.52 M
2023	6.72 M

Sumber: Data Sekunder, 2023

## 2. E-Warung

Program E-Warung merupakan penemuan alternatif dan inovatif yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan sosial. Di e-Warung, penyaluran bantuan sosial seperti BPNT, PKH, penjualan bahan makanan harian, dan subsidi energi masih dalam pengerjaan. E-warung ini merupakan salah satu penyedia layanan bagi semua individu, baik yang mendapatkan bantuan maupun tidak.

## 3. Rantang Kasih

Rantang Kasih memberikan makanan sehat Untuk manula di atas 60 tahun, kurang mampu, terlantar, hidup sendiri, dan tanpa sumber penghasilan. Pemerintah bertugas melaksanakan bantuan pangan ini. Orang-orang yang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan makanan mereka sendiri akan mendapatkan bantuan dalam bentuk makanan lengkap, yang akan dikirim ke rumah penerima setiap hari.

Dengan adanya pernyataan diatas diperkuat dari wawancara salah satu masyarakat penerima bantuan sosial Ibu "Y". Hal ini kemudian di sampaikan oleh Beliau menyampaikan bahwa:

*"dari adanya program E-Warung ini saya merasa terbantu karna untuk pencairan bantuan yang saya dapat lebih muda dan dekat , dengan ini juga saya berterimakasih pada pemerintah yang memberikan kemudahan dengan adanya E-Warung" (Wawancara 25 Oktober 2023)*

Dari wawancara diatas bahwa masyarakat yang telah terdaftar sebagai masyarakat penerima bantuan merasa terbantu dan diperhatikan oleh pemerintah Kota Malang. Dan pihak Dinas Sosial dengan adanya program E- Warung ini masyarakat merasa terbantu untuk pencairan bantuan sosial tersebut, dengan ada program tersebut masyarakat dimudahkan karna disetiap kelurahan pasti ada agen E-Warung yang bisa melayani pencairan bantuan sosial tersebut, dan dipermuda dengan waktu yang tidak lama dan jarak

tempuh yang tidak jauh dan juga masyarakat bisa langsung menukarkan bantuan tersebut dengan bentuk sembako yang sesuai dengan total bantuan yang diperoleh.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti melakukan observasi. Berikut adalah dokumentasi hasil observasi.



Sumber: Data Sekunder, 2023

#### 4. WRSE Dan KOBE

Program bantuan sosial WRSE adalah program bimbingan PKH. Program ini ditujukan untuk janda atau wanita yang merupakan tulang punggung keluarga, membayar tunjangan anak, dan hanya memiliki satu sumber pendapatan. Peserta dalam program bantuan WRSE dimaksudkan untuk membuat atau memulai usaha menggunakan bantuan ini untuk meningkatkan standar hidup mereka dan mengatasi kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan dirancang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan individu yang secara ekonomi kurang beruntung melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, ada program lain yang bertujuan untuk merangsang kegiatan ekonomi. Program WRSE dan KOBE, yang dilaksanakan dalam skenario khusus ini, menyediakan sesi pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kreativitas dalam masyarakat. Akibatnya, individu-individu yang secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini dapat menghasilkan pendapatan dari program, sehingga mendapat manfaat darinya. WRSE dan KOBE berbeda dari segi jumlah bantuan yang diperoleh dan jumlah kelompok, jika WRSE berjumlah 1 orang dan KOBE adalah kelompok yang beranggotakan 5 orang. Enam variabel menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, menurut teori besar Van Meter Van Horn: kebijakan dan tujuan, sumber kebijakan publik, karakteristik atau sifat lembaga atau badan pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan implementasi, sikap implementasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Menurut model di atas, juga merupakan analisis piso yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur implementasi penanggulangan kemiskinan di Kota Malang.

##### 1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Persetujuan atau penolakan yang dilakukan oleh pelaku implementasi kebijakan mempunyai dampak yang signifikan terhadap berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. Berdasarkan Van Metter dan Van Horn (2006) dalam Agustino. Dalam situasi ini, Dinas Sosial Kota Malang mengikuti persyaratan kebijakan ketika menerapkan kebijakan. Kriteria kebijakan disesuaikan dengan program pengentasan kemiskinan Dinas Sosial sendiri. Tentu saja, ada manfaat yang dirasakan oleh Dinas Sosial dan masyarakat ketika program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dilaksanakan. Kebijakan dalam pengelolaan masyarakat, Dinas Sosial mengupayakan agar orang-orang yang membutuhkan dapat menerima bantuan pemerintah atau dukungan non-tunai atau bantuan lainnya sesegera mungkin; Ini adalah bantuan sosial yang diharapkan pemerintah dapat digunakan seefektif mungkin Tujuan dari program pengentasan kemiskinan ini adalah Untuk memastikan bahwa individu yang kurang beruntung dan merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka ditangani secara efektif oleh pemerintah.

## 2. Sumber – sumber kebijakan publik

Kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif sangat penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Orang adalah sumber daya yang paling penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Setiap tahap pelaksanaan memerlukan kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas yang ditentukan oleh kebijakan apolitis. Sumber daya uang dan waktu, selain sumber daya manusia, merupakan masalah penting dalam implementasi kebijakan. Dalam situasi ini, Dinas Sosial bekerja sangat keras untuk mengupayakan agar masyarakat, kemiskinan, dan indeks keparahan menurun, dan dengan adanya program-program yang dibuat oleh Dinas Sosial, kemiskinan di kota Malang dapat diatasi.

## 3. Atribut - atribut atau esensi dari pendirian atau organisasi pelaksana

Lembaga pelaksana yang melakukan kebijakan publik memiliki pengaruh dalam skenario ini. Dengan demikian, jika struktur birokrasi beroperasi dengan lancar, seperti yang diperkirakan; di sisi lain, jika struktur birokrasi tidak stabil, dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan kebijakan publik menemui beberapa hambatan, seperti yang disebutkan oleh Van Meter Van Horn. Dinas Sosial Kota Malang berfungsi sebagai badan pelaksana program, sebagaimana Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2014, yang berkaitan dengan Strategi Pengelolaan Kemiskinan Daerah Kota Malang, berfungsi sebagai pendekatan komprehensif dan strategis untuk mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut.

## 4. komunikasi antara organisasi yang saling berhubungan dengan kegiatan pelaksana

Berkomunikasi adalah salah satu dari variabel salah satu dari kata Van Meter Van Horn, mungkin berdampak pada keberhasilan dalam menerapkan kebijakan. Hal ini digunakan dalam konteks penelitian ini untuk memastikan bahwa inisiatif

penanggulangan kemiskinan di Kota Malang dilaksanakan sesuai dengan protokol. Dinas Sosial Kota Malang senantiasa memantau, mengawasi, dan mensosialisasikan para penyalur yang menjadi tanggung jawab pemberian bantuan sosial kepada seluruh masyarakat perkotaan Kota Malang. Selanjutnya, Dinas Sosial Kota Malang meminta bantuan dari seluruh kelurahan di Kota Malang agar dapat menjinakkan warg mereka setiap bulan yang sangat membutuhkannya.

5. sikap pelaksana

Van Meter Van Horn (pengamat) mengklaim, aspek apa secara substansial menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik, selain komunikasi sumber daya, adalah penerimaan atau penolakan terhadap lembaga pelaksana kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana yang disinggung adalah ketulusan pelaksana kebijakan. Sikap terbuka pemerintah dalam menjalankan operasional, serta disposisi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sejalan dengan peran dan fungsinya yang berbeda, serta perintah langsung dari atasan. Selain itu, Dinas Sosial Kota Malang sangat mendukung apa yang dilakukan pemerintah pusat untuk memerangi kemiskinan melalui langkah-langkah yang dapat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri.

6. Situasi ekonomi, sosial, dan politik

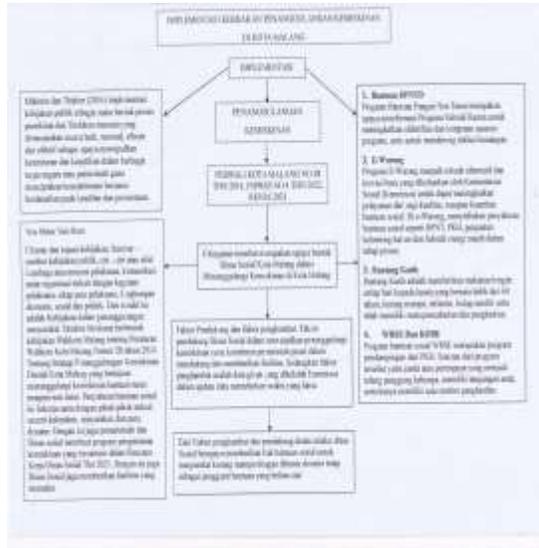
Van Horn dari Van Meter menjelaskan kinerja implementasi kebijakan sebagai jumlah kontribusi luar terhadap pencapaian Peraturan pemerintah. Situasi sosial, moneter, dan politik yang tidak menguntungkan dapatkan menambah masalah dengan diciptakan oleh kinerja aplikasi kebijakan yang buruk Akibatnya, usaha untuk melaksanakan kebijakan harus keadaan lingkungan yang menguntungkan dari luar. Dalam konteks ini, langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang menargetkan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik diindikasikan. Pekerja atau karyawan yang kurang terlatih sering disalahkan atas kegagalan implementasi kebijakan. Dinas Sosial Kota Malang memiliki suasana ekonomi, sosial, dan politik yang kuat, Hanya anggota masyarakat yang dapat mengambil keuntungan dari ini dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas pelatihan. Kota Malang juga memiliki fasilitator tingkat kota yang luar biasa.

### **Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perawatan Kemiskinan Kota Malang**

Faktor pendukung dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang dalam mewujudkan penanggulangan kemiskinan yaitu komitmen dari pemerintah Kota Malang dalam mendukung dan memberikan fasilitas. Selain itu juga yang menjadi faktor pendukung lainnya adalah sumber daya cukup memadai, dari fasilitas, anggaran, dan juga sumber daya manusia. Dengan semua sumber daya yang ada masyarakat Kota Malang juga kreatif serta inovatif. Sedangkan yang menjadi faktor pengahambatnya adalah data given yang di kelola Kemensos yang dalam update data perlu membutuhkan proses yang lama,

hal ini memberikan dampak yang kurang baik pada pemerintah terkait penyaluran tidak sesuai sop dan tidak tepat waktu. Berkenaan dengan penelitian ini model implementasi penanggulangan kemiskinan di Kota Malang pemerintah selaku pemangku kebijakan atau pembuat kebijakan dan juga pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Malang. Dilihat dari berbagai aspek yang dapat mendukung program-program atau kegiatan seperti model berikut ini:

### 1.4 Model Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan



Sumber: Data Sekunder, 2023

## 4. Kesimpulan

Peneliti mencapai kesimpulan berikut berdasarkan temuan penelitian dan diskusi sebelumnya:

1. Pelaksanaan penanggulangan terkait untuk penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial sudah berjalan dengan ketentuan yang sudah ada, didukung juga dengan fasilitas dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat, serta manfaatnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan ini Dinas Sosial dan Pemerintah Pusat dalam upayanya penanggulangan kemiskinan di Kota Malang memberikan bantuan sosial dan pelatihan-pelatihan usaha Mikro yang dapat membantu memulihkan ekonomi masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan adanya program-program ini juga diharapkan pemerintah dan Dinas Sosial dapat menekan indeks kemiskinan dan indeks keparahan. Tetapi dengan adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan ini, masih ada didapati masyarakat yang tidak terdata sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan, dan juga mulai data internal apa terkesan lambat dalam pengolahan data gifen sehingga data masyarakat penerima bantuan sosial baru belum bisa terdistribusi dengan semestinya dari hal ini pihak Dinas Sosial sendiri berupaya mencari bantuan dari

- pihak donatur tetap.
2. Ada tantangan lain yang dihadapi selama prosedur Dinas Sosial Kota Malang yaitu terkait update data yang terkadang masih belum sesuai dan lambat prosesnya. hal ini memberikan dampak buruk bagi pemerintah sehingga dalam proses update data terhambat. Faktor pendorong dalam mewujudkan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang adalah keterlibatan dan dukungan yang membangun segala elemen pemerintah, Dinas Terkait, dan masyarakat.
  3. Model implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang yang sebagaimana pemerintah selaku aktor pelaksana program dalam rencana kerja Dinas Sosial dengan 4 program yang di dukung dengan fasilitas yang memadai, sumber daya yang mumpuni dapat mendorong masyarakat lebih mandiri.

## 5. Referensi

- Hutagalung, J., Nofriansyah, D., & Syahdian, M. A. (2022). *Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Menggunakan Metode Aras*. Jurnal Media Informatika Budidarma, 6(1), 198. <https://doi.org/10.30865/Mib.V6i1.3478>
- Kemiskinan, A., Jumlah, T., Kabupaten, P., Pontianak, K., Dina, F., & Adwiya, R. (2010). *Simposium Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Simnasiptek)*.
- Pakistaji, K., Wonoasih, K., Probolinggo, K., Timur, J., Catur Wulan, Y., Ati, N. U., & Widodo, R. P. (2019). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Kube) (Studi Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di*. Jurnal Respon Publik, 13(4), 104–109.
- Satria, B. (2020). *Implementation Of Additive Ratio Assessment (Aras) Method On Decision Support System For Recipient Of Inhabitable House*. 6(1). <https://doi.org/10.33480/jitk.V6i1.1389>
- Suharto, P. H. D., & Aep Gunarsa, Sh. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial: Vol. Volume 979-3304-39-1* (Sh. Aep Gunarsa, Ed.; September 2017). Bandung : Refika Aditama, 2017 © 2005.
- M., Agus Purwanto, S., & Makmur, M. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam The Policy Implementation Of Prosperous Family Program (Pkh) In Giving Social Protection To The Poor Community (Study In Mojokerto District, Mojokerto Regency)*. 16(2).
- Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., & Setiawan, R. (2020). *Implementation Processes Of Social Protection Policy In Indonesia: Study Of Prakerja Card Program*. Journal Of Governance And Public Policy, 7(3), 247–259. <https://doi.org/10.18196/jgpp.731337>
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi*. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.22437/Pdpp.V7i1.4439>
- Egaty, A. (2022). *Kota Malang Pilot Project Program Pengentasan Kemiskinan*. Viva.Co.Id.

- Waryadi, H., Hanriana, N., Setda, B. U., & Sukabumi, K. (N.D.). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Dialektika Politik Volume 6 Nomor 2, <https://doi.org/10.37949/jdp>
- Mufatiroh, E., Ratnawati, S., & Ananda Kurniawan, B. (2021). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sumpat Kecamatan Driyorejo* (Vol. 8, Issue 2).
- Wardi, S. N. (2020). Program Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( Wrse ). *Jurnal Pendidikan Kewaraganegearaan Dan Hukum Volume, Volume 9 N*, 347–357.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2023. *Berita Resmi Statistik*, 1(5), 8.
- Hadna, A. H., & Kartika, D. (2017). *Evaluation Of Poverty Alleviation Policy: Can Conditional Cash Transfers Improve The Academic Performance Of Poor Students In Indonesia?* *Cogent Social Sciences*,3(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1295548>
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Cv.Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Imam, R., Hafis, A., & Riau, U. I. (N.D.). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik | Vol 5 No. 2 Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Ditengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua*. 5(2), 1180–1192.